

**“POLITIK GENDER (STUDI KASUS PEMILU LEGISLATIF DAPIL II
KABUPATEN BARRU TAHUN 2019)”**



Skripsi

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memenuhi Gelar Sarjana
Ilmu Politik pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

OLEH:

WANDA APRILIA

E111 16 504

DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**"POLITIK GENDER (STUDI KASUS PEMILU LEGISLATIF DAPIL II KABUPATEN
BARRU TAHUN 2019)"**

Yang diajukan oleh :

WANDA APRILIA

E111 16 504

Akan Dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi

Pada Tanggal November 2020

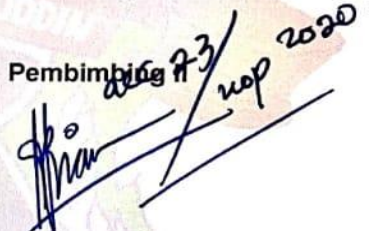
Menyetujui,

Pembimbing I



Prof. Dr. Armin M.Si.
NIP. 196511091991031008

Pembimbing II



Dr. Ariana Yunus, S.IP. M.Si
NIP. 197107051998032002

Mengetahui,

**Ketua Departemen
Ilmu Politik**



Drs. H. A. Yakub, M.Si., Ph.D
NIP. 196212311990021023

HALAMAN PENERIMAAN

HALAMAN PENERIMAAN

SKRIPSI

POLITIK GENDER (STUDI KASUS PEMILU LEGISLATIF DAPIL II KABUPATEN BARRU TAHUN 2019)

Disusun dan diajukan oleh :

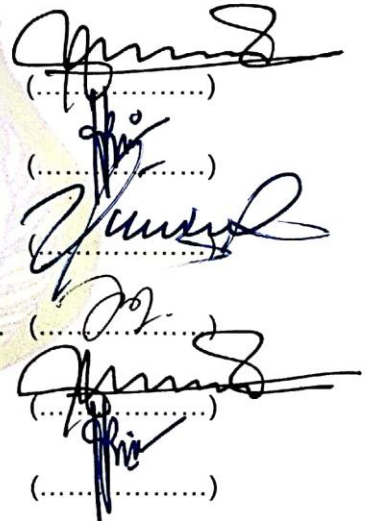
WANDA APRILIA
E111 16 504

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi
pada Program Studi Ilmu Politik
Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Makassar, pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua	: Prof. Dr. Armin, M.Si.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Ariana Yunus, S.IP. M.Si.	(.....)
Anggota	: A. Ali Armunanto, S.IP, M.Si.	(.....)
Anggota	: Ummi Suci fathia Bailusy, S.IP., M.Si.	(.....)
Pembimbing 1	: Prof. Dr. Armin, M.Si.	(.....)
Pembimbing 2	: Dr. Ariana Yunus, S.IP. M.Si.	(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WANDA APRILIA

NIM : E11116504

Jenjang Pendidikan : Strata-1 (S1)

Program Studi : Ilmu Politik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“POLITIK GENDER (STUDI KASUS PEMILU LEGISLATIF DAPIL II KABUPATEN BARRU TAHUN 2019)”** adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 01 Desember 2020



(WANDA APRILIA)

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kahadirat Allah SWT karena segala limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul *“Politik Gender (Studi Kasus Pemilu Legislatif Dapil II Kabupaten Barru Tahun 2019)”*. Penyusunan Skripsi ini merupakan salah satu syarat wajib sebagai mahasiswa strata satu (S1), untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP) pada Program Studi Ilmu Politik, Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Tak lupa juga penulis haturkan salam dan shalawat kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat-Nya ke jalan yang diridhoi Allah SWT dan mengajarkan ketakwaan serta kesabaran dalam menjalani hidup.

Sehubungan dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyadari tanpa bimbingan, arahan serta dukungan yang sangat berharga dari kedua orang tua penulis, sebagai penyemangat hidup di dunia ini, yang sangat penulis cintai dan sayangi, Bapak Darwis Syam serta Ibu Andi Fatmawati yang telah mencurahkan seluruh kasih sayang, cinta dan pengorbanan keringat serta air mata. Segala untaian doa serta

pengharapan tiada henti, yang hingga kapan dan dimanapun penulis tidak akan pernah bisa membalasnya.

Melalui penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga serta memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mengarahkan dan memberikan semangat kepada penulis, antara lain kepada:

1. Ibu Prof. Dwi Aries Tina Pulubuhu, MA selaku rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya yang telah memberikan perubahan-perubahan yang positif bagi sistem pendidikan di Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Armin, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu dan memberi ruang pada penulis selama menempuh perkuliahan di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Dr. Phil. Sukri, M.Si, selaku Wakil Dekan I FISIP UNHAS yang telah banyak memberikan kemudahan terhadap penulis dalam urusan-urusan akademik.
4. Bapak Dr. Suparman Abdullah, M.Si selaku wakil Dekan II FISIP UNHAS yang telah memberikan banyak kemudahan bagi penulis dalam urusan-urusan administrasi.
5. Bapak Dr. Hasrullah, M.Si selaku wakil Dekan III FISIP UNHAS yang telah memberikan banyak kemudahan terhadap penulis dalam urusan-urusan kemahasiswaan.

6. Bapak Drs. H. Andi Yakub, M.si, Ph.D selaku ketua Departemen Ilmu Politik yang telah memberikan banyak kemudahan kepada penulis dalam urusan-urusan administrasi akademik di Program Studi Ilmu Politik.
7. Bapak Prof. Dr. Armin, M.Si selaku pembimbing I yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
8. Ibu Dr. Ariana Yunus, S.IP, M.Si. selaku pembimbing II sekaligus telah menjadi penasehat akademik penulis yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
9. Seluruh dosen-dosen Program Studi Ilmu Politik, Bapak Prof. Dr. M. Kausar Bailusy, MA (Alm), Bapak Prof. Dr. Basyir Syam, M.Ag (Alm), Bapak Prof. Dr. Muhammad, M.Si, Bapak Dr. Muhammad Saad, MA, Bapak Dr. Phil Sukri M.Si, Ibu Dr. Gustiana S.IP.M.SI., Bapak Dr. Imran S.IP. M.Si, Bapak Andi Naharuddin, S.IP, M.Si, Bapak Andi Ali Armunanto, S.IP, M.Si, Ibu Sakinah Nadir, S.IP. M.SI, , Ibu Endang Sari, S.IP, M.SI, Bapak Zulhajar S.IP. MA., Bapak Haryanto, S.IP. MA., Ibu Ummi Suci Fathia B. S.IP, M.Si dan Ibu Dian Ekawati, S.IP M.Si yang telah memberikan banyak ilmu, saran dan arahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
10. Seluruh Staf Pegawai Departemen Ilmu Politik, Ibu Hasna, dan Bapak Aditya dan Bapak Hamzah, yang senantiasa membantu penulis dalam urusan-urusan administrasi akademik.

11. Kepada Siti Salwah Nor Annisa S.IP, Naufal Asyiri Banuarli S.IP, Aswan S.H yang membantu dalam penulisan skripsi.
12. Kepada teman seperjuangan Penulis Hafidah, Andi Tenriana, Ira Andriani, St.Nurzulhulaeva, Gustiani, Rismawati yang tak henti-hentinya memberikan canda tawa serta support kepada penulis.
13. Kepada tim KKN KEMENDES Barru yang dipertemukan pada saat menjalankan KKN Gelombang 102. Terkhusus pada teman-teman posko Pao-Pao yang dipertemukan pada saat menjalankan KKN Gelombang 102. Terima Kasih telah memberikan canda tawa dan support kepada penulis.
14. Untuk saudara-saudariku, Kak Febi dan Adik Dasril yang selalu memberi semangat dan doa kepada penulis.
15. Seluruh teman-teman angkatan Ilmu Politik 2016, Terima kasih telah menjadi saudara yang baik dalam perjalanan di masa perkuliahan bersama di Ilmu Politik Fisip Unhas.
16. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Himapol FISIP Unhas yang telah menjadi rumah belajar penulis selama menjadi mahasiswa.
17. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Keluarga besar Karate-do Gojukai Indonesia Unit FISIP Unhas yang sudah memberikan kenyamanan keluarga selama di Unhas.

18. Terima Kasih juga tidak lupa penulis sampaikan kepada para informan atas segala waktu yang diluangkan serta atas keterbukaan kepada penulis.

Serta kepada semua insan yang tercipta dan pernah berhubungan dengan penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Dan sekali lagi penulis ucapkan terima kasih atas segala bantuan, perhatian, dukungan, bimbingan dan kerja samanya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih terdapat banya kekurangan oleh karena itu, segala masukan,saran, maupun kritik yang sifatnya membangun senantiasa terbuka bagi semua pihak untuk peningkatan kualitas penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Makassar, 30 November 2020

Penulis

ABSTRAK

WANDA APRILIA. E111 16 504, dengan judul Skripsi “Politik Gender (Studi Kasus Pemilu Legislatif Dapil II Kabupaten Barru Tahun 2019)”. Di bawah bimbingan Prof. Dr. Armin, M.Si sebagai Pembimbing I dan Dr. Ariana Yunus, M.Si sebagai Pembimbing II.

Tampilnya kaum perempuan dalam panggung politik diberbagai daerah menunjukkan adanya perubahan paradigma politik yang menginginkan adanya kesetaraan gender dimana ada tuntutan agar kaum perempuan dan kaum laki-laki memiliki kesempatan dan kedudukan yang sama dalam bidang politik. Munculnya anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi yang menjadikan perempuan sebagai alat dalam membenarkan tindakan yang tidak adil terhadap kaum perempuan, sebagian orang beranggapan bahwa kaum perempuan haram menjadi pemimpin dan anggapan lain mengatakan bahwa kemampuan laki-laki lebih unggul dibandingkan wanita.

Penelitian ini dilaksanakan di Dapil II Kecamatan Balusu. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yakni melalui proses wawancara mendalam (indepht interview) kepada beberapa informan serta dari sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Kemudian data yang diperoleh akan direduksi untuk selanjutnya dipilih sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa pandangan masyarakat tentang keberadaan perempuan yang menjadi calon Legislatif dipengaruhi oleh faktor-faktor yang muncul di kalangan masyarakat yaitu adanya faktor persepsi masyarakat, agama, budaya dan pembagian kerja, sehingga menyebabkan ketidakadilan terhadap perempuan yang ingin menjadi calon Legislatif, faktor yang paling menonjol yaitu faktor budaya yang masih dipertahankan masyarakat sehingga menjadi sebuah kendala di tengah masyarakat, inilah yang menjadi masalah utama dan menjadi kebiasaan turun-temurun sehingga muncul pandangan bahwa perempuan berada dibawah kekuasaan laki-laki.

Kata Kunci : Pandangan Masyarakat, Budaya Patriarki, Kesadaran Gender

ABSTRACT

WANDA APRILIA. E111 16 504, with the title of Thesis “Politik Gender (Studi Kasus Pemilu Legislatif Dapil II Kabupaten Barru Tahun 2019)”. Supervised by Supervisor I Prof. Dr. Armin, M.Si and Advisor II Dr. Ariana Yunus, M.Si.

The appearance of women on the political stage in various regions indicates a change in the political paradigm that wants gender equality where there is a demand that women and men have the same opportunity and position in the political field. The emergence of the assumption that women do not need tertiary education, which makes women a tool in justifying unfair actions against women, some people think that women are haram to be leaders and other opinions say that men's abilities are superior to women.

This research was conducted in the Electoral District II, Balusu District. The method used is a descriptive method with a qualitative approach. The technique used in data collection is through the in-depth interview process (indepht interview) to several informants as well as from other sources related to this research. Then the data obtained will be reduced and then selected according to research needs.

The results of this study indicate that the public opinion about the existence of women who become legislative candidates is influenced by factors that arise in the community, namely the existence of factors of community perception, religion, culture and division of labor, causing injustice to women who want to become legislative candidates The most prominent factor is the cultural factor that is still maintained by the community so that it becomes an obstacle in the midst of society, this is the main problem and has become a hereditary habit so that the view appears that women are under the power of men.

Keywords: Community Views, Patriarchal Culture, Gender Awareness

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Teori Psikoanalisis	10
2.2 Budaya.....	11
2.3 Persepsi.....	17
2.4 Perempuan Dalam Agama.....	22
2.5 Pembagian Kerja	23
2.6 Telaah Pustaka.....	24
2.7 Kerangka Berfikir.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Tipe Dan Dasar Penelitian	31

3.2	Lokasi Dan Waktu Penelitian	32
3.3	Informan Penelitian	33
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.5	Analisis Data.....	37

BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

4. 1	Gambaran Umum Pemilihan Di Kabupaten Barru Tahun 2019	39
4. 2	Gambaran Umum Kecamatan Balusu	41
4. 3	Budaya Masyarakat Di Kecamatan Balusu.....	42

BAB V FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERPILIHNYA PEREMPUAN DI DAPIL II KABUPATEN BARRU

5. 1	Persepsi Masyarakat	45
5. 2	Agama.....	48
5. 3	Budaya.....	49
5. 4	Pembagian Kerja	52

BAB VI PENUTUP

6. 1	Kesimpulan	57
6. 2	Saran	59

DAFTAR PUSTAKA.....	61
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	64
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Informan Penelitian	33
Tabel 2 Perolehan Suara Pada Pemilihan Calon Legislatif 2019.....	39
Tabel 3 Perempuan Yang Mencalonkan Sebagai Calon Legislatif 2019.....	41
Tabel 4 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Balusu tahun 2018.	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sejarah perjuangan perempuan di Indonesia telah ada sejak abad ke-19 sejumlah tokoh perempuan telah memperjuangkan kemerdekaan dan kemandirian bangsa, termasuk meningkatkan kedudukan, peran dan kemajuan perempuan Indonesia. Dalam perjuangan perempuan di Indonesia sudah sejak awal telah memperjuangkan hak-hak asasinya dan penegakannya, yang telah dinyatakan melalui pengakuan persamaan hak dengan laki-laki dalam UUD 1945.

Kepemimpinan perempuan sudah menjadi isu publik yang selalu saja menjadi bahan yang diperbincangkan, bahkan memancing polemik serta perdebatan antara pihak yang pro dan kontra terhadap keberadaan pemimpin perempuan di sebuah negara, pengakuan atas hak dasar kemanusiaan telah mengalami sebuah peningkatan yang signifikan diberbagai belahan dunia, pengakuan ini juga telah berlaku atas hak perempuan yang sejajar dengan laki-laki.

Adanya perempuan yang tampil ke depan dan memegang berbagai posisi publik, mereka akan mampu membangun dan menerapkan nilai-nilai sosial dan ekonomi baru yang sesuai dengan kepentingan mereka. Dengan diberlakukannya keterwakilan perempuan di legislatif yang dibatasi dengan adanya kuota 30% diharapkan dapat meningkatkan

keefektifan mereka untuk mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang dapat menjamin hak-hak kelompok perempuan dan masyarakat luas, serta dapat mengalokasikan berbagai sumberdaya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Namun kepentingan-kepentingan mereka masih diremehkan masyarakat, adanya ketidakadilan sistem politik terhadap keberadaan perempuan, khususnya di lembaga legislatif, banyak cara yang telah dilakukan, salah satunya dengan bekerja sama dan berperan aktif dalam partai politik.

Perjuangan terpenuhinya kuota 30% perempuan untuk menduduki kursi legislatif telah memiliki sejumlah tujuan, selain karena adanya hak-hak perempuan diperhatikan terutama yaitu hak perempuan dalam bidang politik sebagai warganegara yang mempunyai hak yang juga sama dengan laki-laki. Adanya isu pemberdayaan perempuan yang telah menjadi gars besar dalam landasan berpikir tentang keterwakilan perempuan dalam bidang politik, juga karena kebijakan-kebijakan serta undang-undang yang disusun memiliki sudut pandang tentang gender, tentunya ini menjadi sebuah harapan yang menjanjikan perempuan dalam perjuangan yang cukup panjang.

Menurut pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) bahwa “segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hokum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tdak ada kecualinya”.

Hal ini dapat dikatakan bahwa adanya kuota 30% keterwakilan perempuan di legislatif tidak mutlak dari suatu partai membentuk image partai sebagai partai yang memenuhi persyaratan. Namun kembali lagi pada pandangan masyarakat yang masih berpandangan bahwa perempuan hanya untuk pemenuhan syarat dalam setiap partai. Dalam hal ini perempuan berjuang untuk mendapatkan kursi di politik dan berhasil untuk mendapatkan kuota yang cukup besar agar bias memberikan andil didalam politik. Catatan sejarah tentang perjuangan panjang berbuah manis ketika terwujud pada kuota 30% yang termuat dan diatur dalam Undang-Undang, namun apabila tanpa persiapan yang matang, akhirnya perempuan justru malah menjadi objek politik oleh kuota yang diperjuangkan. Perempuan ditarik begitu saja turun dan terjun ke politik “hanya” untuk memenuhi kuota. Hasil yang didapat adalah pemenuhan kuantitas bukan sebuah kualitas.

Kepengurusan partai politik disetiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui forum musyawarah partai politik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Sebenarnya dalam mencapai adanya kesetaraan dan keadilan gender ditempuh melalui peningkatan jumlah perempuan yang signifikan pada kepengurusan partai politik pada setiap tingkatan. Undang-Undang No. 12/ 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD juga memuat pasal afirmatif yakni pasal 65 ayat (1) yang menyatakan, setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon

anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota pada setiap daerah yang pemilihannya memperhatikan adanya keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen.

Fakta yang terjadi bahwa adanya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif hanya dijadikan sebagai pemenuhan persyaratan yang menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, selain itu perempuan yang maju dalam lembaga legislatif sebagian dari itu karena adanya ikatan keluarga yang membuat kaum perempuan ikut dalam keterwakilan perempuan, faktor ini juga akan mempengaruhi terhadap pemilih yang kurang percaya dengan perempuan dalam bidang politik, salah satu masalah ini juga terdapat di Kabupaten Barru dimana perempuan yang maju sebagai calon Legislatif hanya dijadikan sebagai pemenuhan syarat sehingga masyarakat masih memandang bahwa adanya kuota 30% pada perempuan merupakan suatu persyaratan saja dalam partai yang mengakibatkan keinginan masyarakat dalam memilih perempuan di Legislatif berkurang.

Undang-undang No. 12/ 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD juga memuat pasal afirmatif, yakni Pasal 65 ayat (1) yang menyatakan, setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bagi setiap daerah pemilihan perlu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Pasal-pasal afirmatif dalam Undang-Undang

Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu diharapkan dapat secara bertahap mengurangi marjinalisasi perempuan dari proses politik formal, membongkar “political male bonding” atau konspirasi politik maskulin serta meningkatkan representasi politik perempuan di parlemen. Dalam jumlah pemilihan Umum (Pemilu) di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan pada tahun 2018 perbaikan jumlah pemilih terdapat 128.740 pemilih dengan rincian 61.703 laki-laki dan 67.037 pemilih perempuan yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan. Namun pada 2019 terdapat perubahan yang kemudian meningkat dengan jumlah daftar pemilih perempuan 67.104 dan untuk laki-laki 61.779 dengan jumlah DPT tersebar di 541 TPS, 55 kelurahan/desa, dan 7 kecamatan di Kabupaten Barru. Karena adanya jumlah warga yang masuk dan sudah terdaftar sebagai pemilih di Barru.

Perempuan di Kabupaten Barru hanya dapat dihitung jari yang menempati kedudukan di lembaga Legislatif, namun tidak beranjak jauh dari adanya Partai tempat bernaung dan latar belakang dari kedudukannya tersebut, tetapi tetap saja masyarakat masih memandang perempuan sebagai suatu hal pemenuhan syarat. Terbukti dalam perolehan suara di DPRD dari 25 Caleg yang terpilih di Kabupaten Barru hanya ada 5 yang berhasil lolos diantaranya yaitu A Yenny (Nasdem), Susanti (Gerindra), Sri Wulandari (PKB), Hj Hamsiati (PKS), Hj Asmirah (PKB). Pada Dapil II yaitu Kecamatan Balusu dan Soppeng Riaja yang menjadi calon Legislatif yaitu Syahrul Ramdani (Nasdem), H Muhammad Akil (PKS), Syamsu Rijal (PDIP), AFK Madjid (PKB), Muh Erdy (Golkar)

dan tidak ada satupun perempuan yang terpilih. Karena fenomena ini maka terlihat bahwa kesejajaran gender merupakan prinsip yang telah diterima secara luas namun hal tersebut belum sepenuhnya terealisasi. Berikut data yang menunjukkan kurangnya keikutsertaan perempuan menjadi calon legislatif.

Adanya fenomena ini terjadi pada kalangan masyarakat di Kabupaten Barru tidak lain karena adanya anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, akhirnya ke dapur juga sering dijadikan sebagai alat dalam membenarkan tindakan yang tidak adil terhadap kaum perempuan. Budaya patriarki mempengaruhi terbentuknya struktur dan sosial politik yang timpang dalam masyarakat, sehingga perempuan yang pada posisi lemah hanya bertahan dalam ruang domestiknya. Persoalan gender akhir-akhir ini sedang menjadi wacana publik yang hangat dibicarakan oleh banyak kalangan. Persoalan ini menyangkut tentang kemitraan dan keadilan peran sosial antara laki-laki dan perempuan. Meskipun demikian, pada kenyataannya sebagian masyarakat ada yang berpendapat bahwa kaum perempuan haram menjadi pemimpin. Ada sebagian orang beranggapan bahwa kemampuan laki-laki lebih unggul dibandingkan wanita, padahal banyak sekali wanita-wanita yang mempunyai potensi yang tidak kalah dengan laki-laki.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional agar dapat meningkatkan kedudukan peran serta kualitas

perempuan agar dapat mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam seluruh proses pembangunan nasional. Pemerintah sudah memberi ruang yang terbuka untuk kaum perempuan dengan adanya kebijakan pengarusutamaan gender yang bertujuan agar kebijakan dan program pembangunan nasional berperspektif kepada gender dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu hal yang membuat penyusun tertarik dalam melakukan penelitian ini didasarkan pada adanya jurnal yang dibuat oleh Ariana, Sukri, Dian Ekawaty tahun 2018 tentang Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pengangkatan Pejabat Struktural, dengan studi kasus Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa secara formal pengangkatan jabatan dalam konteks ASN harus melalui proses penjangkaran tapi faktanya di kota Makassar yang merupakan pendidikan dan pusat pemerintahan pusat di Sulawesi Selatan masih ditemukan adanya bias gender dalam politik, salah satunya yaitu dalam konteks melihat sisi jabatan bagi perempuan yang mana perempuan harus berjuang untuk mendapatkan posisi jabatan.¹

Bagaimana dengan kondisi Kabupaten Barru Kecamatan Balusu ?. Hal ini membuat penulis tertarik ingin melihat hal yang sama jika dilihat dari sisi kabupaten yang masyarakatnya masih tergolong penduduk desa yang mempertahankan budaya patriarki. Penulis semakin yakin bahwa keadaan

¹ Ariana, Sukri, Dian Ekawaty. 2018. Mencermati aspek pengarusutamaan gender dalam penempatan pegawai pada posisi struktural dalam birokrasi di provinsi Sulawesi Selatan. Makassar

kedudukan perempuan bahkan ditengah kota Makassar yang penduduknya sudah memasuki era milenial masih saja mengasingkan perempuan, bagaimana dengan kondisi ditengah masyarakat pedesaan di kecamatan Balusu, sehingga penulis ingin mengetahui bagaimana konteks berfikir mereka dalam memandang peran perempuan dalam konteks politik.

Fenomena-fenomena sosial yang telah dijelaskan sebelumnya terlihat bahwa kesejajaran gender merupakan prinsip yang telah diterima dan dilaksanakan secara luas. Akan tetapi, hal tersebut belum sepenuhnya terealisasi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Politik Gender (Studi Kasus Pemilu Legislatif Dapil II Kabupaten Barru Tahun 2019)”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis berupaya membatasi masalah yang akan diteliti sesuai yang tertuang dalam rumusan masalah yaitu: Faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak terpilihnya caleg perempuan di Dapil II Kabupaten Barru?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

Dapat menggambarkan faktor-faktor yang menyebabkan tidak terpilihnya caleg perempuan di Dapil II Kabupaten Barru.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat akademis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat dalam memandang perempuan dalam bidang politik kepada generasi muda.
 - b. Sebagai bahan informasi dan menambah wawasan bagi pembaca terhadap keterlibatan perempuan dalam politik.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat membuka cakrawala berfikir masyarakat tentang peran politik perempuan di lembaga legislatif.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih positif bagi masyarakat dalam memandang peran perempuan di Lembaga Legislatif Kabupaten Barru.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka penting untuk lebih memperjelas dan mempertegas dalam penelitian dari aspek teoritis. Skripsi, literatur-literatur yang berisi pendapat para ahli, maupun website yang banyak digunakan dalam penyempurnaan penelitian ini.

Sehubungan dengan pembahasan sebelumnya, maka pada bab II ini akan dijelaskan beberapa pengertian yang disertai pendapat para ahli yang memiliki kaitan dengan pokok bahasan serta hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini yang meliputi: Teori Psikoanalisis, Budaya Patriarki, Persepsi, Perempuan dalam Agama, Telaah Pustaka, Kerangka pemikiran.

2.1 TEORI PSIKOANALISIS

Teori Psikoanalisis atau psikodinamika, teori ini menyoroti peran ketidaksadaran dalam perilaku manusia, serta motif-motif dan dorongan-dorongan yang mendasari perilaku tersebut. Bapak teori psikoanalisis adalah Sigmund Freud (1932,1950,1962). Freud berpendapat bahwa struktur kepribadian didasarkan pada tiga elemen. *Id*, yang diwarisi, mencakup insting dan respons terhadap fungsi tubuh (misalnya, rasa lapar). *Id* mengikuti prinsip kesenangan. *Ego* adalah bagian dari kepribadian yang menengahi antara *id* dan hasratnya untuk mencapai

kesenangan, dengan realitas-realitas dunia sosial. Dengan demikian, *Ego* mengikuti suatu prinsip realitas.²

Prinsip realitas ini, tuntutan-tuntutan *id* akan diblokir atau disalurkan sesuai dengan realitas, namun juga sesuai dengan elemen terakhir dari kepribadian, *superego*. *Superego* adalah kekuatan moral atau kata hati dari kepribadian (Hall & Lindzey, 1970). Jadi, jika Anda berinteraksi dengan seorang individu yang sama sekali tidak Anda sukai, *id* mungkin mengilhami Anda agar dengan marah menyerang orang tersebut, namun *ego* mencegah Anda melakukannya karena hal ini secara sosial tidak tepat, dan *superego* mengatakan kepada Anda untuk bersikap baik kepada semua orang dan memaafkan mereka atas perilaku buruk mereka.³

2.2 BUDAYA

Kebudayaan Indonesia yang memarginalkan peran perempuan berpengaruh pada pembentukan karakter bangsa. Sebagai contoh dalam perspektif perempuan, pelanggaran norma seperti yang diatas perlu disosialisasikan dan dikuatkan saat ini, yakni fenomena kekerasan berbasis komunitas atas nama adat dan syariat. Sebuah adat dapat saja berfungsi sebagai wujud kearifan lokal yang memiliki sanksi sosial bila dilihat ancaman kekerasan atas nama aturan adat. Sebagai contoh wilayah Aceh, aturan adat menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang

² Martha L. Cottam dkk. 2012. Pengantar Psikologi Politik. PT RajaGrafindo Persada hal.25

³ Ibid hal.26

menjaga nilai dan norma masyarakat menjadi bagian dari pola pikir dan perilaku masyarakat yang dikuatkan dengan syariat Islam.⁴

Perbedaan gender telah melahirkan ketidakadilan (*gender inequality*) baik bagi laki-laki maupun perempuan. Hal ini dapat dilihat dari manifestasi ketidakadilan yang sudah menjadi budaya masyarakat. Usaha untuk menghentikan bias gender terhadap seluruh aspek kehidupan antara lain dengan cara pemenuhan kebutuhan praktis gender (*practical gender needs*). Kebutuhan ini bersifat jangka pendek dan mudah dikenali hasilnya. Namun usaha untuk melakukan pembongkaran bias gender harus dilakukan mulai dari rumah tangga dan pribadi masing-masing hingga sampai pada kebijakan pemerintah dan negara, penafsiran agama serta epistemologi ilmu pengetahuan. Karena itu diperlukan berbagai aksi melalui kampanye, pendidikan kritis, advokasi untuk mengubah kebijakan, tafsir ulang terhadap aturan keagamaan serta memberi ruang epistemologi berperspekti feminis untuk memberikan makna terhadap realitas yang terjadi yang tidak sesuai.⁵

Budaya juga termasuk yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Budaya Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial dan penguasaan properti. Dalam domain keluarga, sosok yang disebut ayah memiliki

⁴ Abdullah, Najwa.2018. Bias Gender,Pembagian Kerja Dan Pemberian Perawatan.

⁵ Hasni MA, Khairul.2015. *Perjalanan Panjang Perempuan Dalam Budaya*.Direktur Jari Aceh (Jaringan Perempuan untuk Keadilan).

otoritas terhadap perempuan, anak-anak dan harta benda. Beberapa masyarakat patriarkal juga patrilineal, yang berarti bahwa properti dan gelar diwariskan kepada keturunan laki-laki. Secara tersirat sistem ini melembagakan pemerintahan dan hak istimewa laki-laki serta menempatkan posisi perempuan di bawah laki-laki.

Menurut Walby, patriarki adalah sebuah sistem struktur sosial dan praktik-praktik yang memosisikan laki-laki sebagai pihak yang mendominasi, menindas dan mengeksploitasi kaum perempuan. Penggunaan istilah struktur sosial untuk menunjukkan penolakan terhadap determinisme biologis dan gagasan bahwa setiap individu laki-laki berada pada posisi dominan dan setiap individu perempuan dalam posisi subordinat. Berdasarkan definisi tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa patriarki adalah sistem sosial yang berlaku di dalam masyarakat yang melanggengkan dominasi laki-laki terhadap kaum perempuan. Walby juga menjelaskan mengenai struktur-struktur dari patriarki, sebagai berikut:⁶

1. Relasi produksi patriarki dalam keluarga

Dalam struktur ini, pekerjaan rumah tangga perempuan diambil alih oleh suami mereka atau orang-orang yang tinggal bersama mereka. Seorang perempuan boleh jadi menerima

⁶ Adi Wirani. 2016. Sejarah Ideologi Patriarki : Sejarah, Pengertian dan Struktur, Kadar dan Bentuk Ideologi Patriarki

pemeliharaan sebagai ganti dari pekerjaan mereka, khususnya saat mereka tidak memiliki pekerjaan dengan upah. Ibu rumah tangga adalah kelas yang memproduksi, sementara para suami adalah kelas pengambil alih.

2. Relasi patriarki pada pekerjaan dengan upah

Struktur patriarki kedua pada level ekonomi adalah relasi patriarki dalam pekerjaan dengan upah. Sebuah bentuk penutupan patriarki yang kompleks di dalam pekerjaan dengan gaji melarang perempuan masuk ke dalam jenis pekerjaan yang lebih baik dan memisahkan mereka ke dalam pekerjaan yang lebih buruk yang menganggap mereka kurang terampil.

3. Relasi patriarki dalam Negara

Negara juga patriarki sekaligus kapitalis dan rasialis. Sebagai arena perjuangan dan bukan sebagai entitas monolitik, negara memiliki bias sistematis terhadap kepentingan patriarki seperti tampak dalam kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakannya. Misalnya, laki-laki mendapatkan kekebalan hukum dari kekerasan yang dilakukannya kepada perempuan. Pada praktiknya, kekerasan ini disahkan oleh negara, karena negara tidak melakukan tindakan efektif apa pun untuk melawannya.

4. Kekerasan laki-laki

Kekerasan laki-laki merupakan perilaku rutin yang dialami oleh perempuan, dengan akibat standar atas perilaku kebanyakan perempuan. Kekerasan ini secara sistematis dimaafkan dan disahkan oleh penolakan negara untuk campur tangan melawan kekerasan tersebut, kecuali dalam kejadian-kejadian khusus, meskipun praktik pemerkosaan, pemukulan terhadap istri, pelecehan seksual dan lain-lain, terlalu terdesentralisasi dalam praktik mereka sebagai bagian dari negara itu sendiri.

5. Relasi patriarki dalam seksualitas

Bentuk kunci dari struktur ini adalah heteroseksualitas yang wajib dan standar ganda seksual. Struktur patriarki dalam seksualitas membahas tentang alasan-alasan bagi orientasi seksual sebagai seorang heteroseksual, lesbian maupun homoseksual. Alasan ini merupakan pertanyaan sentral bagi analisis feminis radikal, karena melalui alasan inilah hubungan antara bentuk seksualitas yang didominasi laki-laki dan patriarki dibangun.

6. Relasi patriarki dalam lembaga budaya

Lembaga budaya melengkapi susunan struktur sebelumnya. Lembaga-lembaga ini penting untuk pembangkitan berbagai variasi

subjektivitas gender dalam bentuk yang berbeda-beda. Struktur ini terdiri dari seperangkat lembaga yang menciptakan representasi perempuan dari pandangan patriarki dalam berbagai arena, diantaranya seperti agama, pendidikan dan media.

Sistem sosial patriarki menjadikan laki-laki memiliki hak istimewa terhadap perempuan. Dominasi mereka tidak hanya mencakup ranah personal saja, melainkan juga dalam ranah yang lebih luas seperti partisipasi politik, pendidikan, ekonomi, sosial, hukum dan lain-lain. Dalam ranah personal, budaya patriarki adalah akar munculnya berbagai kekerasan yang dialamatkan oleh laki-laki kepada perempuan. Atas dasar "hak istimewa" yang dimiliki laki-laki, mereka juga merasa memiliki hak untuk mengeksploitasi tubuh perempuan. Secara historis, patriarki telah terwujud dalam organisasi sosial, hukum, politik, agama dan ekonomi dari berbagai budaya yang berbeda. Bahkan ketika tidak secara gamblang tertuang dalam konstitusi dan hukum, sebagian besar masyarakat kontemporer adalah, pada praktiknya, bersifat patriarkal.

Sistem patriarki yang mendominasi kebudayaan masyarakat menyebabkan adanya kesenjangan dan ketidakadilan gender yang mempengaruhi hingga ke berbagai aspek kegiatan manusia. Laki-laki memiliki peran sebagai kontrol utama di dalam masyarakat, sedangkan perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh atau bisa dikatakan tidak memiliki hak pada wilayah-wilayah umum dalam masyarakat, baik secara

ekonomi, sosial, politik, dan psikologi, bahkan termasuk di dalamnya institusi pernikahan. Hal ini menyebabkan perempuan diletakkan pada posisi subordinat atau inferior.

Pembatasan-pembatasan peran perempuan oleh budaya patriarki membuat perempuan menjadi terbelenggu dan mendapatkan perlakuan diskriminasi. Ketidaksetaraan antara peran laki-laki dan perempuan ini menjadi salah satu hambatan struktural yang menyebabkan individu dalam masyarakat tidak memiliki akses yang sama. Selain itu, produk dari kebijakan pemerintah yang selama ini tidak sensitif terhadap kebutuhan perempuan telah membuat perempuan sering kali menjadi korban dari kebijakan tersebut. Lemahnya perlindungan hukum terhadap kaum perempuan, secara tidak langsung juga telah menempatkan posisi perempuan menjadi termarginalisasikan. Aspek historis dan budaya menempatkan perempuan sebagai pihak yang ditundukkan melalui hubungan kekuasaan bersifat patriarkat, baik secara personal maupun melalui pengaturan negara.

2.3 PERSEPSI

Persepsi merupakan anggapan atau penilaian yang diberikan oleh seseorang terhadap suatu hal baik maupun buruk. Setiap orang memiliki penilaian yang berbeda-beda. Membahas istilah persepsi akan dijumpai banyak batasan-batasan atau definisi tentang persepsi yang dikemukakan oleh para ahli, persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan

tentang pengalaman terhadap suatu benda ataupun sesuatu kejadian yang dialami.⁷ Di dalam persepsi mengandung suatu proses dalam diri untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana kita mengetahui orang lain. Pada proses ini kepekaan dalam diri seseorang terhadap lingkungan sekitar mulai terlihat. Cara pandang akan menentukan kesan yang dihasilkan dari proses persepsi. Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari cara pandang atau persepsi satu individu terhadap individu yang lain, sehingga memunculkan apa yang dinamakan persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat akan menghasilkan suatu penilaian terhadap sikap. Perilaku dan tindakan seseorang di dalam kehidupan bermasyarakat.⁸

Adanya persepsi masyarakat tentang peran perempuan di lembaga legislatif juga dapat dilihat dari sudut pandang kelompok Dharma Wanita yaitu, anggapan atas keistimewaan laki-laki sebagai seorang pencari nafkah inilah yang kemudian menimbulkan penyingkiran kerja perempuan baik sebagai istri atau ibu. Bahwa kerja perempuan dalam relasi keluarga dianggap sebagai peran kedua karena fungsi domestik yang dijalankannya tidak mendapatkan upah atau gaji secara materil seperti halnya laki-laki.⁹

⁷ Saleh 2004 Pendidikan Gender "Dalam Sudut Pandang Islam" hal 110 (Dalam Skripsi Maharani, 2012. Peran Anggota Legislatif Perempuan Dalam Merespon Kepentingan Perempuan Di Kota Makassar).

⁸ Yudi Hartono & Rohmaul Listyana. 2015. Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013) . Agastya vol 5.

⁹ Rosawati. 2014. Dharma Wanita sebagai Identitas Patriarki. (<http://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/dharma-wanita-sebagai-identitas-patriarki> (diakses pada 14 Februari 2020))

Pandangan masyarakat tidak jauh karena adanya penilaian tentang perempuan yang mempunyai banyak kondisi yang berbeda dengan laki-laki, contohnya yaitu pandangan tentang karakter perempuan yang lemah lembut, dari sinilah terbentuk pandangan-pandangan baru masyarakat bahwa perempuan kurang mampu untuk dijadikan sebagai pemimpin karena masih dianggap sebagai kaum yang lemah, sehingga perempuan seringkali dijadikan sebagai alat untuk membenarkan pekerjaan perempuan adalah rumah setelah menikah.

Pandangan masyarakat khususnya laki-laki juga terpengaruhi karena adanya dorongan dalam diri sendiri yang menyertakan perasaan malu terhadap diri sendiri ketika di pimpin oleh perempuan, karena bagi kaum laki-laki, kedudukan dan posisi yang paling teratas dan menduduki posisi puncak berada pada tangan laki-laki sehingga pandangan inilah yang terus-menerus tertanam pada pemikiran laki-laki.

Adanya sudut pandang dari kelompok Dharma Wanita menjelaskan tentang pandangan masyarakat terhadap perempuan yang masih terkungkung akibat beban identitas patriarki yang masih melekat pada masyarakat dengan kehebatan sosialnya yang dapat mempengaruhi bahkan menjatuhkan kehebatan kinerja perempuan.

Persepsi adalah cara pandang sekelompok orang didasari oleh lintas opini dan pikiran yang mengendap di benak mereka. Lintasan opini dan pikiran ini dibangun oleh pemberitaan yang berulang, sebaran mouth-to-mouth di warung kopi, dan juga hasil refleksi pribadi terhadap lintasan

yang ada. Menimbang mayoritas masyarakat Indonesia bisa mengakses televisi, maka persepsi ini akan terbangun dengan televisi sebagai media utama.

Michael Baumann pada tahun 1960 mengistilahkan *telepolitics* untuk menggambarkan fenomena ini. Mereka yang menguasai televisi akan mendominasi opini publik, sehingga kita sama-sama melihat, saat ini para politisi berlomba-lomba untuk dapat berada di layar televisi untuk memperkenalkan dirinya kepada khalayak ramai. Namun perlu dicatat bahwa opini yang terbangun melalui televisi tidak selalu positif, bisa jadi juga semakin banyak muncul di televisi semakin turun pula elektabilitas seseorang. Hal ini bisa disebabkan oleh kurang disukainya karakter seseorang atau memang ada upaya demarketisasi secara sistemik dari industri media televisi tertentu.

Berbeda dengan persepsi, pencitraan merupakan sebuah rekayasa yang dibangun dengan secara sadar, serta bersifat aktif dan konstruktif yang berarti citra perlu dibangun. Seseorang yang bekerja dengan keras dan giat, apabila tidak disampaikan ke publik, maka publik tidak mengetahui jerih payah yang bersangkutan. Begitu juga dengan partai politik yang ingin melebarkan segmen pemilih perlu membangun citra sedemikian rupa. Pencitraan ini berkaitan dengan simbol, publikasi kegiatan, diksi (jargon yang diulang-ulang), gestur tubuh serta kemampuan dalam membangun viral di antara kerumunan publik.

Sebenarnya antara persepsi dan pencitraan saling berkaitan, meskipun pada akhirnya selera publik menjadi sebuah penentu terakhir. Ketika publik selalu ingin sesuatu yang baru, berbeda, atau bahkan anti-tesis dari karakter yang sebelumnya ada. Artinya, publik selalu haus akan adanya perubahan. Dalam konteks pemilu, publik sering mencari sosok yang berbeda dari sosok yang memimpin Indonesia saat ini. Pola ini setidaknya sudah berlangsung sejak pemilu 2004. Ketika SBY memiliki karakter segar, dipersepsikan bisa memimpin, yang mempunyai gagasan atau cerdas, punya karakter high-profile yang memungkinkan untuk menjadi 'wajah' Indonesia di luar negeri, dan punya 'tampang' sebagai presiden. Namun seiring waktu, 10 tahun memimpin, publik menilai bahwa karakter tersebut ternyata tidak juga cukup. Mereka mencari karakter yang sebaliknya yaitu low-profile, merakyat, tidak perlu terlalu cerdas asal dapat merangkul serta mengayomi, dan seorang eksekutor bukan konseptor.

Membangun persepsi publik dan merekayasa pencitraan diri tidaklah mudah untuk dijalankan dalam satu tahun saja. Perlu upaya yang sistemik dan terukur untuk bisa mencapai hasil yang diharapkan. Setidaknya, kita bisa melihat bahwa mereka yang kini memiliki peluang terbesar untuk menjadi presiden adalah mereka yang telah mendaki tangga persepsi dan pencitraan lebih dari 3 tahun secara konsisten. Transisi demokrasi Indonesia telah membawa publik negeri ini ke arena politik populis.

2.4 PEREMPUAN DALAM AGAMA

Perempuan melakukan pekerjaan berat yang biasa dikerjakan pria dan tetap melakukan tugas-tugas utamanya, maka itu adalah menzalimi kaum wanita, artinya bukan menuntut hak yang sama, tetapi malah menimpakan kezaliman kepada kaum wanita, dimana wanita mendapat tugas ganda. Oleh karena itu berdasarkan perbedaan yang mendasar dalam peranantujuan laki-laki dan wanita, maka mereka berbeda pula dalam watak dan susunan jasmaniyahnya sesuai dengan peranan masing-masing dalam kehidupan, yang memungkinkan mereka menempuh hidup ini dengan mudah.

Munurut Muhammad Qutb, mengatakan bahwa untuk itulah maka ia tidak mengerti ocehan kosong tentang persamaan mutlak antara dua jenis manusia, yang selalu diteriak-teriakkan. Persamaan dalam kemanusiaan merupakan suatu perkara yang wajar dan masuk akal. Laki-laki dan wanita merupakan dua bagian kemanusiaan yang sama penting¹⁰.

Wanita hanyalah makhluk yang tidak dapat hidup merdeka kecuali apabila telah memiliki kebebasan ekonomi, dapat hidup dan berbuat dengan harta, tanpa terikat sedikitpun oleh laki-laki. Pandangan yang sempit itu telah memerosotkan kehidupan manusia pada eksistensi ekonomi belaka. Namun kita setuju pada pendapat mereka yang mengatakan bahwa kebebasan ekonomi mempunyai pengaruh pada

¹⁰ Muhammad Qutb, *Al-Islamu Wa Al-Mar'ah*, Alih Bahasa Anwar Wahdi Hasi, Surabaya: Bungkul Indah, 1986, Cet. Ke-1

pertumbuhan perasaan dan kesadaran manusia. Akan tetapi dalam hal ini, Islam memberikan kedudukan yang lebih istimewa lagi terhadap wanita pada kehidupan ekonomi mereka. Islam memberinya hak memiliki harta, mempergunakannya dan memanfaatkannya oleh dirinya sendiri tanpa melalui perantara. Bahkan dalam masalah-masalah kehidupan lainnya seperti perkawinan, wanita dalam Islam diberi kebebasan.¹¹

2.5 PEMBAGIAN KERJA

Pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dikekalkan dalam dikotomi gender. Pekerjaan mendidik anak, merawat anggota keluarga yang sakit, mengurus segala keperluan sehari-hari (memasak, mencuci, membersihkan rumah) diasosiasikan dengan karakteristik feminin atau keibuan. Selain itu, perempuan secara umum dianggap lebih kompeten dalam melakukan pekerjaan yang memainkan emosi dari laki-laki karena asosiasinya dengan sifat ibu/istri/anak perempuan yang penyayang, lembut dan sabar. Oleh karena itu, dalam ranah publik pun beberapa pekerjaan yang terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut didominasi perempuan dan bergaji rendah. Di Indonesia, misalnya, gaji asisten rumah tangga atau guru sekolah masih terbilang kecil. Profesi suster pun masih sangat didominasi perempuan. Dengan mengkonstruksikan laki-laki sebagai kepala keluarga dan pengambil keputusan utama dalam keluarga,

¹¹ Ulya Kencana. Wanita Dalam Pandangan Agama Dan Bangsa. Palembang. Hal 98

Pemerintahan Orde Baru lebih mudah dalam mengekalkan ideologi gender dan kapitalisme hingga ke akar masyarakat. Langkah-langkah ini merupakan alasan mengapa ketimpangan gender dan kesenjangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan menjadi karakteristik yang dominan pada masyarakat modern-kapitalis. Hal ini juga merupakan faktor yang mengakibatkan jurang pemisah pekerjaan perempuan dan laki-laki, di mana pemberian perawatan dan profesi terkait masih dikonstruksikan sebagai pekerjaan feminim.

Terlepas dari perkembangan zaman, pembagian kerja dan pemberian perawatan yang masih eksklusif diperuntukkan bagi perempuan masih sangat kuat di ruang privat, bahkan dalam konteks negara maju. Hal ini karena ketiga gelombang feminisme dunia belum memberikan prioritas terhadap pengadvokasian kondisi ibu, istri dan anak-anak perempuan yang terjerat bias gender kapitalisme di keluarganya.

2.6 TELAAH PUSTAKA

Penelitian ini bukanlah penelitian yang secara khusus membahas mengenai pandangan masyarakat terhadap perempuan dalam lembaga. Sebagai pembanding, penelitian ini bertumpu pada tiga literature yang terdiri dari satu jurnal dan tiga skripsi.

Pertama yaitu jurnal Ariana yang berjudul “Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pengangkatan Pejabat Struktural, dengan studi kasus Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi

Selatan”. Dalam hal ini menjelaskan bahwa adanya pandangan masyarakat kota terhadap peran perempuan dalam pengangkatan jabatan. Dalam hal ini gender masih saja menjadi masalah bagi masyarakat dalam memandang status kedudukan perempuan. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa secara formal pengangkatan jabatan dalam konteks ASN harus melalui proses penjurangan tapi faktanya di kota Makassar pengangkatan pegawai cenderung tertutup dan berakibat pada kesempatan bagi kelompok perempuan untuk menempati posisi jabatan.¹²

Kedua yaitu skripsi Ludita yang berjudul “Persepsi Masyarakat Desa Terhadap Pencalonan Wakil Bupati Perempuan Dalam Perspektif Gender”. Dalam skripsi ini membahas mengenai budaya masyarakat yang secara turun-menurun masih menempatkan peran perempuan di sektor domestik dan laki-laki di sektor publik yang mengakibatkan akses perempuan dalam berpartisipasi di dunia politik juga sangat rendah, dalam skripsi ini juga menjelaskan bahwa adanya golongan besar maupun golongan kecil masyarakat yang saling terikat dan mempengaruhi satu sama lain, adanya perempuan yang maju sebagai calon wakil bupati di desa Logede, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen memberikan gambaran masyarakat yang masih mempertahankan persepsi tentang keraguan terhadap perempuan yang maju sebagai calon wakil bupati, akibat kurangnya pemahaman mengenai konsep gender yang dimiliki

¹² Ariana, Sukri, Dian Ekawaty. 2018. Mencermati aspek pengarusutamaan gender dalam penempatan pegawai pada posisi struktural dalam birokrasi di provinsi Sulawesi Selatan. Makassar

masyarakat sehingga terus menerus menghasilkan persepsi yang bersifat negatif terhadap perempuan.

Skripsi ini juga menjelaskan bahwa adanya faktor usia juga dapat mempengaruhi persepsi masyarakat, biasanya semakin matang usia seseorang maka akan cenderung lebih bijaksana, skripsi ini menunjukkan bahwa ada persepsi yang mengatakan bahwa perempuan yang kurang matang dalam segi usia akan terkesan memiliki kharisma sebagai seorang calon pemimpin, karena masyarakat masih memandang hal tersebut agar mampu menjadi suri tauladan yang baik bagi warganya, tidak harus memiliki pendidikan memadai namun juga punya jiwa pemimpin yang besar dan kemauan dari dalam dirinya.

Perbedaan antara literatur ini yaitu pada literatur ini menjelaskan pandangan masyarakat dari perspektif gender yang memfokuskan adanya kondisi pikiran emosional masyarakat saat diwawancarai terhadap calon perempuan yang memperhatikan faktor usia yang menjadi penentu kharisma dari calon yang akan maju serta keterlibatan perempuan terhadap kegiatan di desa tersebut dan sulitnya mengadakan sosialisasi mengenai kesetaraan gender.¹³

Ketiga yaitu skripsi Wahyu yang berjudul “Kepemimpinan Perempuan Dalam Pandangan Masyarakat Babakan Tasikmalaya (Analisis Terhadap Hadis *Lan Yufliha Qawmun Wallaw Amrahum Imraatan*)” dalam skripsi ini menjelaskan tentang realitas kehidupan kaum perempuan yang terlihat

¹³ Ludita Hardiyanti 2012. Persepsi masyarakat desa terhadap pencalonan wakil bupati perempuan dalam perspektif gender. Fisip Universitas Negeri Yogyakarta

masih ditempatkan di pinggir-pinggir sosial, perempuan dalam masyarakat sering dipandang sebagai makhluk kelas dua, bahkan hak-hak perempuan dibatasi pada wilayah kehidupan. Dalam skripsi ini juga menjelaskan bahwa adanya hambatan fisik perempuan seperti mengandung, melahirkan, dan menyusui yang menjadi keharusan perempuan bekerja dalam bidang rumah tangga, serta adanya hambatan teologis yang memandang perempuan sebagai makhluk yang diciptakan untuk laki-laki dalam hal mendampingi, menghiburnya, dan mengurus keperluannya. Perempuan dianggap sebagai makhluk lemah dan perasa yang menjadi pemahaman masyarakat hingga sekarang.¹⁴

Perbedaan pada literatur ini menjelaskan bahwa adanya kedudukan perempuan dalam pandangan masyarakat tidak lain karena adanya kodrat perempuan yang hanya menjadi kelas dua dan telah dijelaskan dalam agama bahwa perempuan bertugas untuk mendampingi laki-laki dan menghiburnya dan tempat terbaik bagi perempuan adalah rumah menurut islam yang menjelaskan keadaan tersebut.

Keempat yaitu skripsi Siti yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Perempuan Di Kota Banda Aceh” dalam skripsi ini menjelaskan bahwa persepsi masyarakat diakibatkan karena adanya perkembangan sejarah yang memperlihatkan bahwa dari awal pergerakan para perempuan di dunia pada tahun 1800-an, yang menjelaskan bahwa para perempuan menganggap ketertinggalan mereka disebabkan karena

¹⁴ Wahyu Ismatulloh 2014. Kepemimpinan perempuan dalam pandangan masyarakat babakan Tasikmalaya. Universitas Islam Negeri (uin) Syarif Hidayatullah. Jakarta

kebanyakan perempuan masih tergolong buta huruf, miskin dan tidak memiliki keahlian, dalam skripsi ini juga menjelaskan karena adanya dampak feminisme yang nyata keberadaannya. Hingga saat ini karena adanya sejarah tentang perempuan yang membuat masyarakat juga memandang perempuan sebagai makhluk yang rendah.¹⁵

Perbedaan dari literatur ini yaitu dalam skripsi ini menjelaskan tentang adanya pandangan masyarakat terhadap perempuan yang melihat dari adanya latar belakang sejarah yang dihasilkan perempuan sehingga persepsi masyarakat tentang keberadaan perempuan di lembaga legislatif juga masih diragukan.

2.7 KERANGKA BERPIKIR

Faktor-faktor luar mempengaruhi adanya minat masyarakat dalam memilih calon legislatif, faktor ini antara lain persepsi masyarakat, adanya pandangan yang mengaitkan dengan agama, budaya dan pembagian kerja. Selain itu adanya pengaruh budaya yang mempengaruhi persepsi masyarakat.

Pandangan masyarakat tentang peran perempuan di lembaga legislatif membuat kaum perempuan untuk berperan aktif dalam politik menjadi terasingkan. Kurangnya pengetahuan masyarakat yang kemudian membuat masyarakat memandang rendah perempuan yang ingin menjadi calon anggota lembaga legislatif sehingga dalam melakukan tindakan sosial yang saling mempengaruhi masyarakat lain sehingga masyarakat

¹⁵ Siti Intan Maulana.2017. Persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan di kota Banda Aceh. Universitas Syiah Kuala Darussalam.

memahami sebagai suatu makna dan berakhir dengan membuat pilihan sesuai dengan pandangan masing-masing masyarakat.

Masyarakat di Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru masyarakat masih tergolong membedakan kedudukan perempuan dan laki-laki di lembaga legislatif dengan berbagai alasan dan segala sudut pandang sehingga membuat penulis membuat skema pikir sesuai dengan yang terjadi di masyarakat Kecamatan Balusu Kabupaten Barru, selain itu semakin kuatnya faktor-faktor persepsi, budaya

SKEMA PIKIR

